

## **BAB 2**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Partisipasi Masyarakat**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen yang krusial dan mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan, terlebih jika dikaitkan dengan pergeseran paradigma pembangunan yang kini telah menempatkan manusia dan masyarakat sebagai sentral dalam pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai objek yang dibangun tetapi sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Conyers,1982) terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, yaitu partisipasi masyarakat merupakan suatu alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui perihal proyek tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri (Supriatna, 2000).

Menurut Talizuduhu partisipasi adalah Turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan mengenai persoalan di mana

keterlibatan pribadi orang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukannya. **Keith Davis menyatakan bahwa** Partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Suherlan Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah serta keterlibatan masyarakat dalam memikul dan memetik hasil atau manfaat pembangunan

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Sumarto & Hetifa, 2003) Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. (dalam Siti Fatimah, 2012).

Tujuan partisipasi masyarakat dapat berubah setiap waktu, tergantung lingkungannya. Menurut Kelly (dalam Adiyoso, 2009), awalnya partisipasi bertujuan untuk memberi kekuasaan kepada masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di negara sedang berkembang. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi hidup masyarakat memaksa mereka untuk memainkan peran penting dalam pembangunan (Soetomo 2006). Sanoff (2000) berpendapat bahwa tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.

### **2.1.1 Fungsi dan Manfaat Partisipasi Masyarakat**

Carter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1989) dalam Santosa dan Heroepoetri (2005) merinci fungsi dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat sebagai suatu Kebijakan
2. Partisipasi Masyarakat sebagai Strategi
3. Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Komunikasi
4. Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa
5. Partisipasi Masyarakat sebagai Terapi

Lebih lanjut Santosa dan Heroepoetri (2005:5) juga merangkum manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab Kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik. Sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.
2. Meningkatkan proses belajar, Pengalaman berpartisipasi secara psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk berpartisipasi lebih jauh.
3. Mengeliminir perasaan terasing, Karena turut aktifnya berpartisipasi dalam suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasing. Karena dengan berpartisipasi akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.
4. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program

partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Serta menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.

5. Menciptakan kesadaran politik, bahwa partisipasi masyarakat pada tingkat lokal, dimana pendidikan nyata dari partisipasi terjadi, seseorang akan belajar demokrasi. Ia mencatat bahwa orang tidaklah belajar membaca atau menulis dengan kata-kata semata, tetapi dengan melakukannya. Jadi, hanya dengan terus berpraktek pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat belajar bagaimana mempraktekkannya dalam lingkup yang lebih besar lagi.
6. Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat bahwa melalui partisipasi masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan didapat, karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.
7. Menjadi sumber dari informasi yang berguna. Masyarakat sekitar, dalam keadaan tertentu akan menjadi pakar yang baik karena belajar dari pengalaman atau karena pengetahuan yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari partisipasi adalah masyarakat dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan.
8. Merupakan komitmen sistem demokrasi, Program partisipasi masyarakat membuka kemungkinan meningkatnya akses masyarakat kedalam proses pembuatan keputusan.

### **2.1.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Menurut Ericson dalam Slamet (1993) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi ( lengkapai di LTBR) pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek.

Masyarakat berpartisipasi dengan aktif dalam mengikuti rapat warga dan juga ikut memberikan usulan, saran dan kritik pada rapat tersebut;

2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Keith Davis dalam Sastropetro (1988) mengemukakan beberapa jenis partisipasi masyarakat meliputi:

1. Pikiran  
pikiran merupakan jenis partisipasi pada level pertama dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
2. Tenaga  
merupakan jenis partisipasi pada level kedua dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
3. Pikiran dan tenaga  
merupakan jenis partisipasi pada level ketiga dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama. Biasanya konteks partisipasi tersebut berada pada suatu lembaga atau partai.

4. Keahlian

merupakan jenis partisipasi pada level keempat dimana dalam hal tersebut keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan.

5. Barang; dan

merupakan jenis partisipasi pada level kelima dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.

6. Uang

merupakan jenis partisipasi pada level keenam dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang pada kalangan atas.

Konkon dan Suryatna (1978) memberikan tawaran bahwa partisipasi dapat diwadahi dalam:

1. Buah pikiran, dalam hal ini seperti rapat, diskusi, seminar, pelatihan dan penyuluhan,
2. Tenaga, seperti gotong royong,
3. Harta benda dan,
4. Keterampilan

Menurut Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979), tahap pelaksanaan merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.

Menurut Taufiqullah (2007), partisipasi masyarakat dalam hal sumbangan tenaga dapat juga diartikan bahwa bentuk partisipasi masyarakat berkaitan dengan kemampuannya untuk berkontribusi.

Davis dan Newstrom (1989) menyebutkan bahwa salah satu esensi dari partisipasi adalah keterlibatan yang berarti adanya keterlibatan mental dan

emosional dibanding hanya aktivitas fisik, sehingga dengan itu maka partisipasi secara sukarela lebih jelas dibanding mobilisasi.

Pandangan lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh Mubyarto (1984), “partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorban kepentingan diri sendiri”.

### **2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet, 1993). Menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah. Tingkat, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

Menurut Sastropetro (1988), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri, penginterpretasian yang dangkal terhadap agama, kecenderungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk seperti halnya terjadi di beberapa negara dan tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

#### **2.1.4 Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Menurut Sherry (Arntein, 4 Juli 1969) pada makalahnya yang termuat di *Journal of the American Institute of Planners* dengan judul “A Ladder of Citizen Participation”, bahwa terdapat 8 Tingkat tingkat partisipasi berdasarkan ukuran kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, kedelapan tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Manipulation* (manipulasi)

Tingkat partisipasi ini adalah yang paling rendah, yang memposisikan masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan persetujuan



dalam berbagai badan penasehat. Dalam hal ini tidak ada partisipasi masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

2. *Theraphy* (terapi/penyembuhan)

Dengan berkedok melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, para ahli memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah.

3. *Informing* (informasi)

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun yang sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada masyarakat, tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

4. *Consultation* (konsultasi)

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering digunakan adalah survei, pertemuan lingkungan masyarakat, dan dengar pendapat dengan masyarakat.

5. *Placation* (penentraman/perujukan)

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang

mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

6. *Partnership* (kerjasama)

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah. Telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

7. *Delegated Power* (pelimpahan kekuasaan)

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas. Jadi masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

8. *Citizen Control* (kontrol masyarakat)

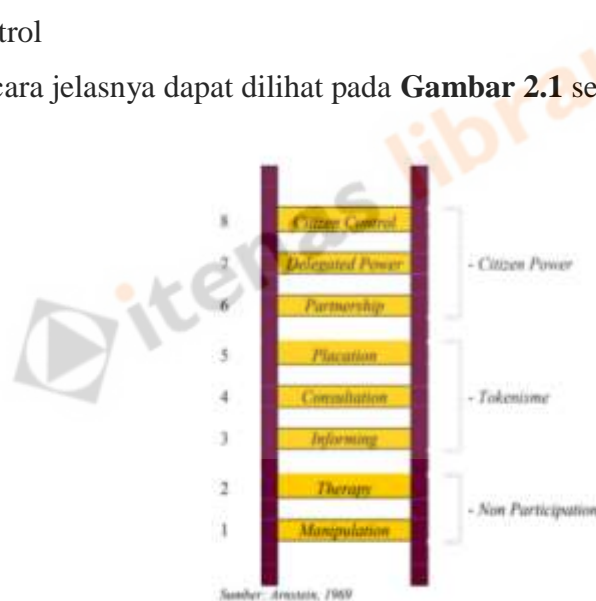
Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan untuk

merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya.

Dari kedelapan tipologi tersebut, menurut Arnstein (1995) secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada partisipasi serta atau non participation yang meliputi manipulation dan therapy.
2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau degrees of tokenism yang meliputi informing, consultation dan placation
3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau degrees of citizen power yang meliputi partnertship, delegated power dan citizen control

Secara jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 2.1** sebagai berikut;



**GAMBAR 2. 1 DELAPAN TANGGA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT**

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 1999).

## **2.2 Pengertian Kampung Wisata**

Kampung wisata merupakan bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat di mana terdapat sekelompok wisatawan yang dapat tinggal atau berdekatan dengan lingkungan tradisional tersebut untuk belajar mengenai kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan ketiga bentuk integrasi tersebut, desa/kampung wisata dibagi menjadi 3 elemen desa/kampung wisata yaitu elemen dasar (*primary elements*), elemen sekunder (*secondary elements*), dan elemen tambahan (*additional elements*).

Kampung Wisata adalah salah satu ungkapan kehidupan manusia yang menyuguhkan tujuan wisata perkampungan. Dalam perwujudannya, kampung wisata hendaknya dapat memenuhi tuntutan yang ada baik yang menyangkut fasilitas wisata, sirkulasi, dan pengolahan ruang luar yang memiliki banyak keanekaragaman. Daerah tujuan wisata adalah kawasan atau daerah tertentu yang memiliki potensi seperti atraksi dan objek-objek wisata yang ditunjang oleh hubungan lalu lintas, fasilitas kepariwisataan dan usaha-usaha pariwisata serta masyarakat menjadi kebutuhan wisatawan.

Tujuan wisatawan adalah untuk

- Rekreasi/berlibur.
- Keperluan pengetahuan dan kebudayaan.
- Keperluan tugas dll.

Objek wisata budaya yang luas diseluruh Indonesia merupakan kekayaan budaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai penunjang peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No 9 tahun 1990 pasal 19 menyarankan bahwa perusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata. Merupakan peninjauan atas terhadap kelayakan fasilitas pelayanan dan penciptaan kepuasan kepada pengunjung.

### 2.2.1 Karakter Kampung wisata

Kampung wisata merupakan sebuah potensi pariwisata yang dapat menunjang perekonomian suatu daerah tertentu. Kampung wisata dapat dikatakan sebagai suatu daerah yang berpotensi wisata jika mempunyai suatu keunikan di daerah tersebut berupa kehidupan keseharian masyarakat setempat, adat istiadat, kebudayaan setempat yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Beberapa karakter yang mendukung keberhasilan suatu kampung wisata sebagai berikut:

1. Sasaran wisatawan  
Semakin banyak wisatawan yang datang, semakin informasi tentang daerah wisata berkembang keseluruh penjuru dunia
2. Lokasi  
Lokasi yang memiliki potensi wisata yang menarik bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan.
3. Fasilitas wisata  
Fasilitas menjadi pelengkap bagi para wisatawan yang dapat dinikmati dan menjadi objek wisata yang menimbulkan atraksi wisata.
4. Arsitektur atau suasana harus memiliki sesuatu yang istimewa sesuai dengan karakter pariwisata daerah setempat.
5. Citra  
Sebuah kampung wisata merupakan gambaran karakter dari kampung itu yang membentuk identitas unik dan khas dapat dibentuk dengan menghadirkan nuansa pedesaan dan budaya setempat serta tradisi lokal kedalam kampung wisata.

Kampung wisata akan berkembang dengan baik jika didukung beberapa masyarakat yang memang mengenal dan mendukung berkembangnya suatu daerah. Selain itu perlu juga beberapa faktor pendukung keberhasilan kampung wisata yaitu sebagai berikut:

- Keanekaragaman fasilitas rekreasi.
- Akomodasi yang bersih dan nyaman.
- Lokasi yang menarik dan terjangkau.

- Nilai budaya yang terkandung.
- Suasana lingkungan dan fasilitas objek yang beranekaragam.

Pengembangan konsep Kampung wisata dinilai sangat efektif dalam rangka mengenalkan serta memberi peluang sebesar – besarnya kepada masyarakat perkampungan untuk memahami esensi dunia pariwisata serta menikmati hasil dari kepariwisataan tersebut. Bagi daerah-daerah yang memiliki karakteristik dan keunikan terutama di keseharian masyarakat perkampungan maka pengembangan konsep ini sangat direkomendasikan. Ada tiga keuntungan yang utama dalam pengaplikasian konsep ini pada suatu daerah yaitu;

- Dengan adanya kampung wisata maka pengelola harus menggali dan mempertahankan nilai adat budaya yang telah berlangsung selama puluhan tahun di kampung tersebut. Lestarnya nilai- nilai budaya merupakan daya tarik utama bagi wisatawan.
- Masyarakat kampung yang notabene memiliki kemampuan ekonomi yang kurang dapat berperan aktif dalam kelangsungan kampung wisata. Akhir dari konsep ini tentu saja agar peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat akan lebih termaksimalkan.

### 2.3 Kajian Literatur

Dari beberapa uraian di atas, maka disusun kajian literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Rangkuman kajian literatur dimaksud untuk memperoleh variabel yang digunakan untuk melakukan evaluasi bentuk dan partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Kampung Wisata Kreatif Pasir Kunci. Berikut adalah rangkuman kajian literatur dimaksud:

**TABEL 2. 1 RANGKUMAN LITERATUR**

NO	KOMPONEN	SUMBER	TEORI	VARIABEL
1	Bentuk Partisipasi Masyarakat	Keith Davis	Partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ide-ide/pikiran</li> <li>• Harta benda</li> <li>• Keterampilan</li> </ul>
2	Partisipasi	Talizuduhu	Turut sertanya seseorang baik secara	Turut serta secara mental

NO	KOMPONEN	SUMBER	TEORI	VARIABEL
	Masyarakat		mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan mengenai persoalan di mana keterlibatan pribadi orang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukannya	maupun emosional
3	Partisipasi Masyarakat	Suherlan	Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah serta keterlibatan masyarakat dalam memikul dan memetik hasil atau manfaat pembangunan	Keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan serta memetik manfaatnya
4	Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat	C.Ericson dalam bukunya Slamet (1994)	Bentuk partisipasi masyarakat adalah berupa konsultasi, sumbangan spontan, mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berada di luar lingkungan tertentu, mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat, sumbangan dalam bentuk kerja, aksi massa, mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa mandiri dan membangun proyek komunitas yang bersifat otonom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga</li> <li>• Uang</li> <li>• Material</li> <li>• Pikiran</li> <li>• Keahlian/keterampilan</li> </ul>
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Sherry Arnstein	Terdapat delapan tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>manipulation,</i></li> <li>• <i>therapy,</i></li> <li>• <i>informing,</i></li> <li>• <i>consultation,</i></li> <li>• <i>placation,</i></li> <li>• <i>partnership,</i></li> <li>• <i>delegated power</i></li> <li>• <i>citizen control</i></li> </ul>
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Chapin	Kriteria tingkat partisipasi sosial: <ul style="list-style-type: none"> <li>- keanggotaan dalam organisasi</li> <li>- kehadiran dalam pertemuan</li> <li>- membayar sumbangan</li> <li>- keanggotaan dalam kepengurusan</li> <li>- kedudukan dalam kepengurusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keanggotaan dalam organisasi</li> <li>• kehadiran dalam pertemuan</li> <li>• membayar sumbangan</li> <li>• keanggotaan dalam kepengurusan</li> <li>• kedudukandalamkepengurusan</li> </ul>
7	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi	Y. Slamet	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan mata pencaharian	Faktor-faktor : <ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis kelamin</li> <li>• usia</li> <li>• tingkat pendidikan</li> <li>• tingkat pendapatan</li> <li>• mata pencaharian</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Dari rangkuman dalam **Tabel 2.1** di atas, maka untuk melaksanakan penelitian tentang bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Wisata Kreatif Pasir Kunci adalah mengunkan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Wisata Kreatif Pasir Kunci dilihat dari variabel: Bentuk partisipasi pemikiran, Bentuk partisipasi harta benda dan Bentuk partisipasi keterampilan.

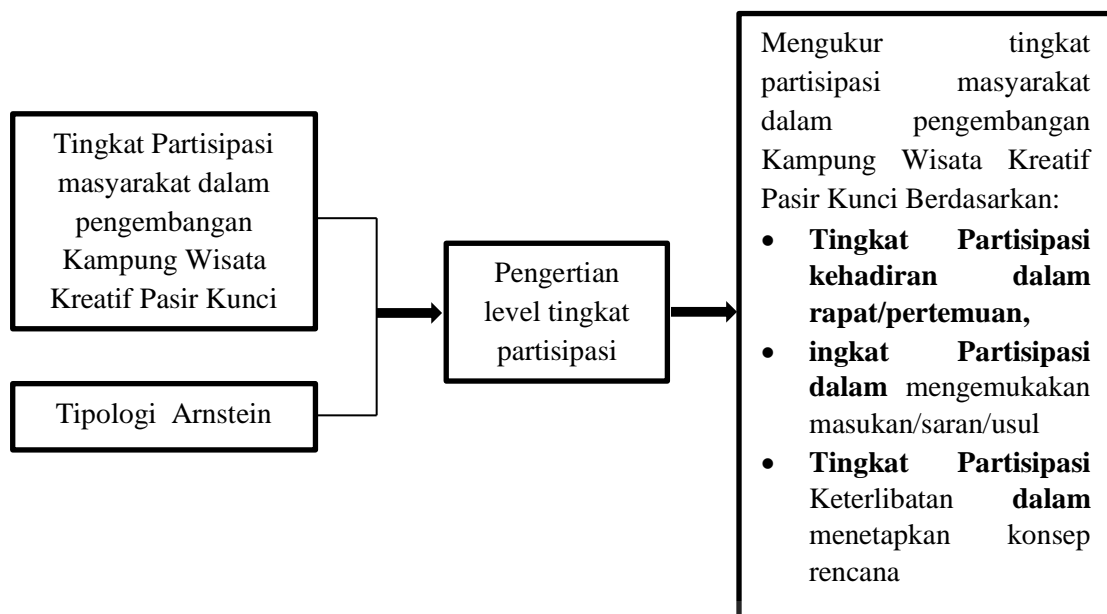
**TABEL 2. 2 DEFINISI KETERKAITAN VARIBEL BENTUK PARTISIPASI**

No	Bentuk Partisipasi	Variabel	Definisi Operasional
1	Bentuk partisipasi pemikiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ide</li> <li>• Pendapat</li> </ul>	Adanya partisipasi dalam bentuk sumbangan ide/pendapat atau saran dari masyarakat sekitar dalam membantu pengembangan kawasan wisat
2	Bentuk partisipasi harta benda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang</li> <li>• Barang</li> </ul>	Adanya partisipasi dalam bentuk uang, barang atau penyediaan sarana/fasilitas dari masyarakat sekitar untuk membantu pengembangan kawasan wisata
3	Bentuk partisipasi keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan skill Dan Pelatihan</li> </ul>	Adanya partisipasi dalam bentuk bantuan keterampilan atau keahlian seperti melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk pengembangan kawasan wisata

Sumber: Hasil Analisis, 2020

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Wisata Kreatif Pasir Kunci diliat dari variabel: **Tingkat Partisipasi kehadiran dalam rapat/pertemuan, Tingkat Partisipasi dalam mengemukakan masukan/saran/usul, Tingkat Partisipasi Keterlibatan dalam** menetapkan konsep rencana. Apabila tingkat ini dikorelasikan dengan tipologi Arnstein, maka akan didapatkan tingkatan sebagai berikut:





**GAMBAR 2. 2 BAGAN KETERKAITAN TINNGKAT PARTISIPASI**

**TABEL 2. 3 KETERKAITAN VARIABEL TINGKAT PARTISIPASI DENGAN TIPOLOGI ARNTEIN**

No	Variabel	Skala Penilaian	Tingkat Arnstien	Derajat Partisipasi
1	Tingkat kehadiran dalam pertemuan	Hadir karena dipaksa	<i>Manipulation</i>	<i>Non Participation</i>
		Hadir sekedar memenuhi undangan	<i>Therapy</i>	
		Hadir untuk memperoleh informasi tanpa menyampaikan pendapat	<i>Informing</i>	<i>Degrees Of Tokenism</i>
		Hadir untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat tapi pendapatnya tidak diperhitungkan	<i>Consultation</i>	
		Hadir dan menyampaikan pendapat namun hanya sedikit pendapat yang diperhitungkan	<i>Placation</i>	
		Hadir dan mendapat pembagian tanggung jawab yang sama	<i>Partnership</i>	<i>Degrees Of Citizen Power</i>
		Hadir dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan	<i>Delegated power</i>	
		Hadir dan mampu untuk membuat keputusan	<i>Citizen control</i>	
2	Tingkat keaktifan dalam berdiskusi dan mengemukakan pendapat	Hadir hanya sebagai pendengar saja	<i>Manipulation</i>	<i>Non Participation</i>
		Hadir dan memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja.	<i>Therapy</i>	
		Hadir dan mengemukakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat	<i>Informing</i>	<i>Degrees Of Tokenism</i>
		Hadir dan melakukan dialog/tanya	<i>Consultation</i>	

No	Variabel	Skala Penilaian	Tingkat Arnstien	Derajat Partisipasi
		jawab dengan pemerintah.		<i>Degrees Of Citizen Power</i>
		Hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada apa yang direncanakan	<i>Placation</i>	
		Hadir dan membagi tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah	<i>Partnership</i>	
		Hadir dan diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.	<i>Delegated power</i>	
		Hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.	<i>Citizen control</i>	
3	Tingkat Partisipasi dalam Pengambilan keputusan konsep Rencana	Tidak ikut menetapkan konsep rencana	<i>Manipulation</i>	<i>Non Participation</i>
		Ikut menetapkan konsep rencana tetapi untuk kepentingan pemerintah saja	<i>Therapy</i>	
		Ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat.	<i>Informing</i>	<i>Degrees Of Tokenism</i>
		Ikut berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana.	<i>Consultation</i>	
		Ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada konsep rencana.	<i>Placation</i>	
		Ikut menetapkan konsep rencana dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah.	<i>Partnership</i>	<i>Degrees Of Citizen Power</i>
		Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.	<i>Delegated power</i>	
		Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.	<i>Citizen control</i>	

Sumber: Hasil Analisis, 2020

- Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dilihat dari variabel: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan jenis pekerjaan (Slamet).